



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : **BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**
UNIT KERJA : **ANGGOTA BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LILIK LUJAYANTI**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA**
3. NHK : **718697**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.950.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/185 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1094 m2/120 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah Seluas 2.663 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , WARISAN Rp. 300.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
9. Tanah Seluas 394 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
10. Tanah Seluas 940 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 75.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.



75.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.558.543.842
F. HARTA LAINNYA	Rp.	150.000.000
Sub Total	Rp.	7.733.543.842
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.733.543.842

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.